

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROGRAM BANTUAN OPERSIONAL SEKOLAH DAERAH SMA NEGERI 1 KASUI WAY KANAN

Oleh

Duwi Meilina, Irawan Suntoro, Sowiyah

FKIP Unila: Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung

e-mail: wandajuliatmaja@gmail.com

HP: 081282467623

This study aims to analyze and describe, organizational structure, mechanisms, monitoring systems, barriers, and response/feedback stakeholders in SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan. This research method used descriptive qualitative approach, and the data were obtained from interviews in the form of opinions, feedback, information, concepts and information in the form of a description in exposing the problems, document review and field observations. The results of this study indicate that (1) the organizational structure, there are two teams, namely a steering committee and management team, (2) the implementation mechanism is done so that programs can be run properly, (3) monitoring systems need to monitor and foster the implementation of the program, (4) constraints of obstacles found in the implementation of the delays in implementation, not the discipline of the school in reporting and data collection, the lack of technicians in the preparation of reports like SPJ, RAKS, RAPBS, (5) the response / or feedback stakeholders, there are two responses: positive and negative.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan, struktur organisasi, mekanisme, sistem monitoring, hambatan-hambatan. Dan respon/tanggapan pemangku kebijakan (*stakeholder*) di SMAN 1 Kasui Way Kanan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh dari wawancara berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah, kajian dokumen dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) struktur organisasi terdapat dua tim yaitu tim pengarah dan tim manajemen, (2) mekanisme dilakukan supaya program dapat berjalan dengan baik, (3) sistem monitoring untuk memantau dan membina pelaksanaan program, (4) hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program dan solusinya, (5) respon/tanggapan pemangku kebijakan (*stakeholder*) terdapat dua respon yaitu positif dan negative.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, program bosda

PENDAHULUAN

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan yang mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan sangat diperlukan bagi suatu kelompok manusia agar dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Secara khusus fungsi dan tujuan pendidikan di rumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 dan 3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Setelah diamati oleh peneliti ternyata ada banyak faktor dalam pelaksanaan pendidikan di Way Kanan dan salah satunya yang paling mendasar adalah masalah biaya, permasalahan ini adalah masalah yang paling sensitif karena akibat kurang biaya maka anak usia sekolah setelah lulus SMP atau MTS mereka tidak lagi melanjutkan ke jenjang SMA, SMK dan Aliyah, karena masyarakat menganggap terlalu besar biaya untuk menyekolahkan anaknya kejenjang lebih tinggi, dan hal ini jelas menjadi sebuah permasalahan yang tidak hanya masalah biaya tetapi juga kurang kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya maka faktor biaya di jadikan alasan untuk tidak menyekolahkan anaknya. Permasalahan yang menjadi perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk segera mencari solusi untuk mengatasi masalah pendidikan maka dari itu Pemerintah Kabupaten Way Kanan membuat sebuah kebijakan pendidikan yang dengan tujuan agar permasalahan biaya sekolah sedikit ada keringanan, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah membuat

suatu kebijakan yang disebut program Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) sebagai bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk meningkatkan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan yang menyeluruh.

Fokus penelitian ini antara lain: Struktur organisasi Bantuan, Mekanisme Implementasi, Sistem Monitoring, Hambatan-hambatan, Respon Pemangku Kebijakan (*Stakeholder*).

Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2000:131) analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Berdasarkan pendapat di atas diketahui pembuatan kebijakan bersifat politisi, dan analisis kebijakan digunakan dalam proses pembuatan kebijakan. Para analisis kebijakan merupakan satu dari banyak tipe pelaku kebijakan lainnya dalam sistem kebijakan.

Menurut Abidin dalam Syafaruddin (2008:76) kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Kebijakan publik sebagai apa yang dihasilkan pemerintah dapat merupakan kebijakan umum, kebijakan teknis, dan kebijakan operasional pada tingkat yang paling rendah. Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing suatu organisasi. Kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi dengan kata lain, kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi melangkah kemasa depan.

Kebijakan Pendidikan

Menurut Tilaar dan Riant Nugroho (2008:140) pengertian kebijakan pendidikan merupakan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu.

Menurut Linblom dalam Syafaruddin (2008:79) ada tiga pendekatan dan model kebijakan pendidikan yang sering di gunakan, yaitu:

1. Pendekatan analisis, yaitu pendekatan suatu proses membuat kebijakan yang didasarkan pada pengambilan keputusan tentang masalah dan beberapa pilihan kebijakan alternatif atas dasar hasil analisis;
2. Pendekatan politik, yaitu pembuat kebijakan atas dasar pengambilan keputusan tentang pilihan kebijakan dengan pengaruh kekuasaan, tekanan dan kendali pihak lain;
3. Pendekatan analisis dan politik, yaitu pendekatan ini digunakan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada pendekatan analisis dan pendekatan politik;

Pendekatan dalam analisis kebijakan menggunakan pendekatan deskriptif dan normatif. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk menyajikan informasi apa adanya kepada pengambil keputusan, agar pengambil keputusan memahami permasalahan yang sedang disoroti dari suatu isu kebijakan. Sedangkan pendekatan normatif dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan dalam memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan dapat memecahkan suatu kebijakan. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah

dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi.

Implementasi Kebijakan

Menurut Eugene Bardach dalam Agustino (2012:138) implemenasi kebijakan adalah:

“cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya, dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2012:139) implementasi kebijakan sebagai berikut:

“ Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagi cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Sedangkan, menurut Meter dan Horn dalam Agustino (2012:139) implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Model pendekatan implementasi kebijakan publik menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2012:140) adalah dijelaskan adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yaitu: “pendekatan *top down* dan *bottom up*. Istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan control dan komando, yang mirip dengan *top down approach*)” dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa pendekatan *top down* dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan implementasi kebijakan, kemudian keputusannya pun diambil dari tingkat pusat.

Implementasi kebijakan publik model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan A Model of The Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk

kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi berlangsung dalam hubungan berbagai variable. Model ini mengendalikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksanaan, dan kinerja kebijakan publik.

Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah suatu kebijakan program pemerintah Way kanan yang berkorelasi dari BOS pusat dibentuk untuk mewujudkan pendidikan gratis wajib 12 tahun, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dibentuk pada tahun 2011 oleh Peraturan Bupati Way kanan No: 24 tahun 2011 dan dirancang dan di evaluasi oleh BAPPENDA, penyelenggara dari program ini adalah Dinas Pendidikan sebagai tim manajemen dari Bantuan Operasional Sekolah Dearah (BOSDA) dan juknis dari program tersebut, adapun breakdown dari program ini adalah P2KA. Kemudian dana APBD yang sebagai dasar pendanaan program Bantuan Operasioanl Sekolah Daerah (BOSDA) pun di sesuaikan dengan kemampuan kabupaten Way kanan. program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) mempunyai 3 pilar yaitu: (1) sebagai pelayanan dan aksesibilitas pendidikan, (2) meningkatkan kompetensi dan relevansi pendidikan, (3) pengelolaan pendidikan dan *good governance*, dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di kabupaten way kanan akan terlihat dampak dari kebijakan tersebut dengan melihat APK dan APM dari masyarakat yang lanjut sekolah.

Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Peraturan Bupati Way kanan No: 24 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di Kabupaten Way Kanan. Bertujuan supaya masyarakat dalam usia

pendidikan dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ini masyarakat usia pendidikan dapat di beri keringanan dalam pembiayaan sekolah agar program bupati Way Kanan gratis pendidikan 12 tahun dapat terwujud.

Peraturan Bupati Way Kanan No: 24 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di Kabupaten Way Kanan. Bertujuan supaya masyarakat dalam usia pendidikan dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ini masyarakat usia pendidikan dapat di beri keringanan dalam pembiayaan sekolah agar program bupati Way Kanan gratis pendidikan 12 tahun dapat terwujud.

Kerangka Pikir

Penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Way Kanan, berdasarkan hasil identifikasi masalah yang faktanya bahwa banyak anak usia sekolah tidak melanjutkan sekolah karena masalah biaya. Kebijakan pendidikan yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan adalah program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) menjadi input dalam implementasi kebijakan pendidikan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ini, kemudian, program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ini menjadi proses dalam implementasi kebijakan daerah Way Kanan, dengan tujuan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang menjadi Output dalam kebijakan pendidikan yang berdampak pada efektivitas sekolah, dan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dapat berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di

Kabupaten Way Kanan. Tujuan penelitian ini adalah Struktur organisasi, Mekanisme Implementasi, Sistem Monitoring, Hambatan-hambatan, Respon Pemangku Kebijakan (*Stakeholder*).

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini melalui tahapan seperti: koding, reduksi data, penyajian data, verifikasi data, penarikan kesimpulan, pengecekan keabsahan data, kemudian tahapan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Struktur Organisasi Implementasi** **Kebijakan Pendidikan Program** **Bantuan Operasional Sekolah Daerah** **(BOSDA)**

Pada struktur organisasi implementasi kebijakan pendidikan program bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) di Kabupaten Way Kanan terdapat dua Tim terdapat dua Tim dalam program pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan yaitu Tim Pengarah dan Tim Manajemen, kemudian Tim Manajemen dalam Dinas Pendidikan terbagi menjadi dua yaitu Tim Penanggungjawab dan Tim pelaksana semua saling berkoordinasi untuk menciptakan organisasi yang kondusif.

Sedangkan pada sekolah SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan membentuk Tim Pelaksanaan Program BOSDA di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan, hal itu bertujuan supaya pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Dalam struktur organisasi pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan melibatkan warga sekolah seperti Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara dan Komite., dengan adanya struktur organisasi tersebut diharapkan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dapat berjalan sesuai ketentuan.

Mekanisme Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan

mekanisme pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan tersebut berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Terlebih dahulu Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ini akan dilaksanakan maka terlebih dahulu ada sosialisasi ke berbagai pihak seperti ke kecamatan-kecamatan, sekolah-sekolah, setelah disosialisasikan program dilaksanakan dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh aktor kebijakan dalam peraturan Bupati yang didalamnya terdapat Petunjuk Teknis Dan Petunjuk Pelaksanaan. Seluruh satuan pendidikan yang mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) maka harus mengacu pada pedoman tersebut. Semua sudah diatur dengan jelas dari mulai pengusulan dana, pencairan dana, dan pertanggungjawaban termasuk hal-hal yang menjadi larangan yang tidak boleh dilakukan.

pelaksanaan diawali dengan mensosialisasikan terlebih dahulu Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ini ke masing-masing satuan pendidikan, kemudian setiap satuan pendidikan mensosialisasikan lagi kepada orang tua/wali melalui rapat komite yang diadakan setiap awal tahun ajaran baru. Setelah program disosialisasikan dan semua pihak mengetahui dan memahami, maka program dapat dilaksanakan dengan mengikuti aturan dan alur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Bupati Way Kanan, pedoman pelaksanaan yang tercantum didalamnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan.

Pelaksanaan mencakup pengajuan dan pencairan dana, penggunaan dan pelaporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah sebagai aktor kebijakan. Hal-hal yang dipertanggungjawabkan berupa pelaporan penggunaan biaya operasional yang sudah diatur dan disusun dalam juknis dan juklak.

Sistem Monitoring Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan

kegiatan monitoring implementasi kebijakan pendidikan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Tim Manajemen Penanggung Jawab, Dinas Pendidikan Way Kanan melaksanakan monitoring per tri wulan ke tiap-tiap satuan pendidikan namun dalam pernyataan dalam wawancara mengindikasikan masih belum adanya kedisiplinan pihak Dinas Pendidikan dalam memonitoring.

Proses monitoring tersebut dilaksanakan sebagai tanda pertanggungjawaban dan kepedulian pemerintah terhadap pelaksanaan program, karena setelah proses monitoring dilakukan, Tim koordinasi tersebut harus melaporkan kepada Bupati. Namun yang menjadi target monitoring hanya sebatas kesesuaian penggunaan dana dan pelaporan pertanggungjawaban saja, tidak

memonitoring bagaimana pelaksanaan dan hambatan yang terjadi disatuan pendidikan, sehingga kendala yang ada pada satuan pendidikan masih ditangani masing-masing.

pada proses monitoring, tim manajemen penanggung jawab dari Dinas Pendidikan yang salah satu tugasnya adalah memonitoring program. Secara berkala memantau pelaksanaan ke masing-masing satuan pendidikan. Setelah itu tim manajemen penanggung jawab bertugas melaporkan hasil memonitoringnya untuk dipertanggung jawabkan pada Pemerintah Daerah Yang dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Way Kanan.

Hambatan-hambatan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan

Pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), di temukan beberapa hambatan untuk satuan pendidikan seperti halnya keterlambatan dana, tidak disiplin pihak sekolah pelaporan dalam data terkait program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Minimnya tenaga ahli dalam bidang administrasi menyebabkan banyak terjadi kesalahan dalam penyusunan data, masih ada ketidakdisiplinan terkait monitoring, dan masih tidk ada transparasi yang jelas terkait penyusunan SPJ. Memang jika berbicara masalah dana maka hal sensitif yang terlihat. Namun sebagai stakeholder dalam kebijakan pihak sekolah harus lebih bisa transparan terkait penyusunan SPJ maupun seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dan sulit mengatasi apabila ada dana yang tak terduga seperti acara tambahan biaya ekstrakurikuler perpisahan, kematian dan biaya lainnya yang diluar rencana. Teknisi tidak sesuai dengan ahlinya maka masih banyak kesalahan dalam penyusunan program, dan dengan adanya keterlambatan biaya tersebut maka guru honorer pun terkadang untuk menggaji pun pihak sekolah harus pintar-pintar mengatur strategi supaya

tetap bisa menggaji guru honorer. Dengan adanya Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tersebut maka harapannya sekolah dapat efektif tetapi jika dana hanya sebesar Rp750000 ribu tersebut maka butuh penambahan supaya sekolah akan lebih efektif karena sekolah dapat mengeksplor kemampuan siswa dan dapat meningkatkan mutu pendidikan menjadi sekolah lebih efektif.

Respon/ Tanggapan (Stakeholder) Terhadap Keberadaan Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Keberhasilan suatu program salah satunya adalah dengan adanya dukungan dan masukan dari berbagai pihak terkait. Program ini menghasilkan respon positif dan respon negtaif dari berbagai pihak dan ada beberapa tanggapan dan mereka berhak berpendapat demikian untuk dapat dijadikan masukan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan.

PEMBAHASAN

Penulis sajikan pembahasan penelitian ini secara berturut-turut tentang stuktur organisasi, mekanisme implementasi, sistem monitoring, hambatan-hambatan, respon/tanggapan (*stakeholder*) sebagai berikut.

Struktur Organisasi

Sistem organiasai dapat didefinisikan sebagai kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan sumber-sumber, dan lingkungan, dengan hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. dalam hal ini sangat diperlukan suatu pengorganisasian untuk dapat melaksanakan program dengan baik, hal ini dibentuk supaya ada yang bertugas dan bertanggungjawab serta untuk membangun kerjasama dalam keberhasilan suatu program. Tanpa adanya suatu sistem organisasi yang baik mustahil jika pogram tersebut dapat berjalan lancar maka dari itu butuh penyatuan dan menghimpun

sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya untuk mensukseskan program tersebut. Hasil analisis yang penulis lakukan adalah dengan melakukan wawancara dan observasi pada sekolah tempat peneliti dan Dinas Pendidikan.

Mekanisme Implementasi

kegiatan pelaksanaan pun dapat dijalankan dilingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan. Kegiatan awal yang mendahului implementasi kebijakan pendidikan ini dengan sosialisasi terlebih dahulu. Pelaksanaan kebijakan program berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang sudah diatur oleh Pemerintah Daerah. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan permotivasi agar setiap pelaksanaan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggungjawabnya.

Sistem Monitoring

Proses Kebijakan Program selanjutnya adalah dengan melaksanakan monitoring dengan tujuan adalah melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dalam hal ini dapat di monitoring oleh pihak inspektorat dan juga Dinas Pendidikan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring ini dilakukan setiap per triwulan, dalam hal ini menunjukkan bahwa ada koordinasi antara Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan supaya pelaksanaan program dapat berjalan dengan sesuai tujuan. Yang menjadi fokus monitoring adalah kesesuaian administrasi dengan pelaksanaannya. Pelaporan dan

pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.

Hambatan-hambatan

Hasil penelitian menemukan bahwa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan adalah sebagai berikut:

1. Pencairan dana bantuan terlambat, seharusnya uang dapat digunakan pada awal tahun tetapi sering pencairan pertengahan semester, ini terjadi karena tahun anggaran berbeda dengan tahun pelajaran, jadi berpengaruh pada pembiayaan sekolah dan proses pembelajaran. Sedangkan sekolah harus dituntut untuk terus berjalan, tetapi dana untuk operasional belum tersedia. Hal ini sangat menjadi masalah pihak sekolah karena harus mencarikan dana lain untuk dapat mencover kebutuhan supaya proses pembelajaran terus berjalan dan lancar, maka dari itu pihak sekolah harus mempunyai cara untuk dapat menutupi kebutuhan yang ada tanpa mengganggu kegiatan proses belajar mengajar.
2. Tingkat kebutuhan biaya operasional tiap tahunnya berbeda dan ada juga pengeluaran yang tak terduga, sedangkan pembiayaan dana sudah dirinci dalam Juknis dan Juklak, jadi pihak sekolah sulit menentukan yang mana kebutuhan yang harus dijadikan prioritas utama. Maka dari itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan menunda keperluan yang tidak mendesak untuk dapat memilih-milih kebutuhan mana yang harus lebih diutamakan. Dan pemenuhan kebutuhan dan perbaikan kerusakan sarana prasarana dilakukan bergantian dilihat dari tingkat urgensinya.
3. Kebijakan Program Bantuan Operasional Daerah selain mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Way Kanan, tetapi hal

tersebut juga dapat memicu adanya isu negatif yang dapat terjadi seperti: (1) Menimbulkan sebagian peserta didik yang berlaku seenaknya karena mereka merasa sekolah tidak ada beban; (2) Biaya yang dibantu hanyalah biaya operasionalnya saja yang dikelola oleh sekolah sehingga jika sekolah jika ingin mengadakan bimbel, atau Les maka pihak sekolah mau tidak mau memungut biaya dari siswa; (3) Kemudian jika ada kegiatan atau hal yang mendadak yang membutuhkan dana maka sekolah akan kelabakan untuk menanganinya;

4. Dari pihak satuan pendidikan terkadang ada juga yang kurang disiplin dalam pelaporan SPJ tiap per tri wulan. Dan minimnya tenaga teknis mengakibatkan peran guru harus berperan ganda menjadi teknis program dalam sekolah. Contohnya menjadi bendahara.

Pelaksana kebijakan selalu dihadapkan dengan kendala, oleh karena itu para aktor kebijakan semestinya selalu mengadakan evaluasi kebijakan yang melibatkan intern dan ekstern. Kalau dilihat dari masalah atau kendala yang tersebut, kendala hampir semua tertuju pada sekolah, jadi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) layak atau tak layak suatu kebijakan seperti yang di ungkapkan oleh Yoyon (2011:55) suatu kebijakan dapat dilihat dari ukuran-ukuran sebagai berikut:

1. Dari aspek formulasi kebijakan pendidikan, yaitu: (1) filsafat pendidikan yang dipakai dasar penyelenggara pendidikan; (2) teori dan ilmu yang dipakai rujukan untuk setiap komponen pendidikan; (3) system nilai yang dijadikan dalam pengembangan asumsi-asumsi yang melandasi praktik-praktik pendidikan;

2. Pada tatanan implementasi kebijakan : (1) prioritas permasalahan [ada tiap aspek pendidikan; (2) pendekatan dan prosedur implementasi yang digunakan; (3) peran pelaku kebijakan; (4) setting lingkungan yang memungkinkan berpengaruh pada seluruh aspek kebijakan;

Pada tahapan evaluasi kebijakan pendidikan, terutama pada aspek: (1) dampak terhadap efisiensi penggunaan sumber daya; (2) kemanjurannya terhadap pencapaian target; (3) akuntabilitas para pelaku kebijakan.

Dari pernyataan diatas menegaskan bahwa untuk menghindari kendali-kendala yang dihadapi dengan melakukan pendekatan pada pelaku kegiatan dan melaksanakan kebijakan dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait dalam kebijakan, tidak hanya berfokus pada satu aspek saja.

Respon/ Tanggapan (Stakeholder)

Sesuai dengan pernyataan Yoyon (2011:96) salah satu hal yang menunjang keberhasilan kebijakan adalah peran serta masyarakat. Para manajer pendidikan di daerah kabupaten/kota sebagai aktor kebijakan diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan di bidang pendidikan kabupaten/kota untuk melaksanakan program dalam bidang pendidikan yang setuju pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, aktor kebijakan harus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberi respon dan masukan terhadap kebijakan program.

Program ini melahirkan respon positif bagi masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu dan dengan adanya program ini masyarakat yang kurang mampu merasa terbantu. Sesuai hasil wawancara dengan beberapa informan mereka menyatakan bahwa program ini sangat meringankan beban mereka. Sehingga biaya yang tadinya buat bayar

SPP sekarang sudah tidak lagi. Namun ada beberapa informan yang cemas dengan pemikiran bahwa pendidikan yang baik akan ditunjang dengan biaya yang cukup pula, apalagi biaya pendidikan sekarang semakin hari semakin tinggi. Beberapa berpandangan ada keraguan dengan murahnya biaya, bagaimana dengan pelayanan yang diberikan praktisi pendidikan jangan sampai alakadarnya pula. Mereka sebagai konsumen pendidikan juga menginginkan pendidikan dan pelayanan yang berkualitas seiring kemajuan jaman.

Kemudian dengan tanggapa Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan beliau mengatakan bahwa dengan adanya program ini jumlah siswa yang mendaftar menjadi meningkat tiap tahunnya. Tapi karena ada keterbatasan guru dan ruang yang tersedia, maka pihak sekolah membatasi penerimaan bagi siswa yang mendaftar tidak tertampung.

Untuk tanggapan dari peserta didik yang diambil sebagai informan disekolah tersebut maka mereka berpendapat bahwa program ini baik dan sangat mendukung, dengan adanya program ini maka siswa yang lulus SLTP yang tidak mampu melanjutkan maka mereka berkeinginan dan termotivasi untuk melanjutkan sekolah ke SLTA. Harapan mereka meskipun ada bantuan untuk meringankan beban orang tuanya, tapi kreatifitas mereka tidak terhambat karena biaya yang terbatas.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dalam meningkatkan angka partisipasi siswa telah berhasil namun perlunya pemerintah untuk dapat mengevaluasi hasil dari program tersebut supaya program tersebut dapat menjadi tepat sasaran tanpa mengenyampikan mutu pendidikan dan sangat diharapkan Pemerintah Daerah dapat terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan supaya mereka menyadari bahwa pendidikan itu sangat berpengaruh pada

masa depan anak-anaknya menurut penulis jika suatu Pemerintah Daerah mampu membuat program dengan baik dalam hal ini masyarakat kurang memahami arti pentingnya pendidikan maka yang terjadi adalah sikap semaunya dan kurang bertanggung jawab atas anak-anaknya dan anak-anaknya pun merasa acuh dan seenaknya sendiri karena mereka merasa sekolah saja di biayai oleh pemerintah jadi yang terjadi kurng tanggung jawabnya akan pentingnya pendidikan. Kemudian program ini dapat berjalan dengan baik maka harus dapat bekerja sama dengan pihak terutama *stakeholder*. Kemudian Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan harus mempunyai manajemen pembiayaan dan transparan dalam pengelolaannya supaya disekolahnya mampu menghindari permasalahan yang berhubungan dengan anggaran bisa diatasi.

Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian sudah dilaksanakan sebaik mungkin dan sesuai dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan, namun penelitian ini tetap memiliki keterbatasan yaitu:

1. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga hasil dari peneliti ini tidak dapat di generalisasikan.
2. Waktu penelitian bersamaan dengan aktifitas di sekolah tersebut sehingga pelaksanaan penelitian kurang maksimal
3. Waktu penelitian di Pemerintah Kabupaten Way Kanan brsamaan dengan waktu kerja kantor sehingga pelaksanaan penelitian kurang maksimal
4. Jumlah informan terbatas karena peneliti hanya dilakukan pada satu sekolah.

Pengembangan Model Pendekatan *Direct and Indirect on Implementation* (George C. Edward III) pada Implementasi Kebijakan Pendidikan

Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

1. Rasional

Dalam pengembangan penelitian kebijakan pendidikan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) peneliti menggunakan pendekatan *Direct and Indirect on Implementation* oleh George Edward III, model ini dikembangkan berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam sumber daya manusia atau tenaga teknis dalam hal ini menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program, kemudian jadwal penyaluran dana masih belum tepat waktu ada keterlambatan dalam pencairan dana dan dalam hal ini di harapkan menjadi perhatian bagi Tim pelaksana bagian penyaluran dana, kemudian harus ada penjadwalan monitoring yang berkala dan disiplin sesuai aturan yang ada, dan selanjutnya harus adanya transparasi dalam penyusunan SPJ, memang jika berbicara masalah dana akan terkesan sensitif tetapi dalam hal ini harus ada transparasi dan sistem yang baik supaya dana yang memang diperlukan dalam operasional sekolah dapat tepat dalam sasarannya.

2. Landasan Teori

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2012:149) dalam pendekatan implementasi terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi; (2) Sumberdaya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur birokrasi.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diketahui bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi, karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Apabila komunikasi berjalan dengan baik maka akan ada efektifitas dalam implementasi kebijakan pendidikan. Diharapkan aktor kebijakan dapat tepat, akurat, dan konsisten dalam pembuatan

keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan di terapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator dalam variable komunikasi adalah: (1) Transmisi, penyalurn komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebagaikan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistrosi ditengah jalan. (2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). (3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika pemerintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Kemudian untuk variable kedua yaitu sumberdaya terdapat indikator yang dapat mempengaruhi yaitu: (1) Staf, sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebagiannya oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Maka dari itu dibutuhkan kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. (2) Informasi, dalam implementasi kebijakan. (3) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. (4) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Untuk variable ketiga yaitu disposisi mempunyai indicator sebagai berikut: (1) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personol yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. (2) Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Untuk variabel ke empat struktur birokrasi dalam hal ini sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksanaan kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terrealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Didalam keempat variabel tersebut jika dapat bersinergi dalam pelaksanaannya maka kesuksesan dalam implementasi kebijakan akan dapat berjalan dengan baik.

3. Langkah-langkah Model Pendekatan *Direct and Indirect on Implementation* (George C. Edward III) pada Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

1. Perencanaan dalam hal ini Pemerintah Way Kanan dapat membuat peraturan dengan menggunakan Model Pendekatan *Direct and Indirect on Implementation* (George C. Edward III) untuk model kebijakan pendidikan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Way Kanan.

2. Pengorganisasian peran serta seluruh komponen dalam pelaksanaan

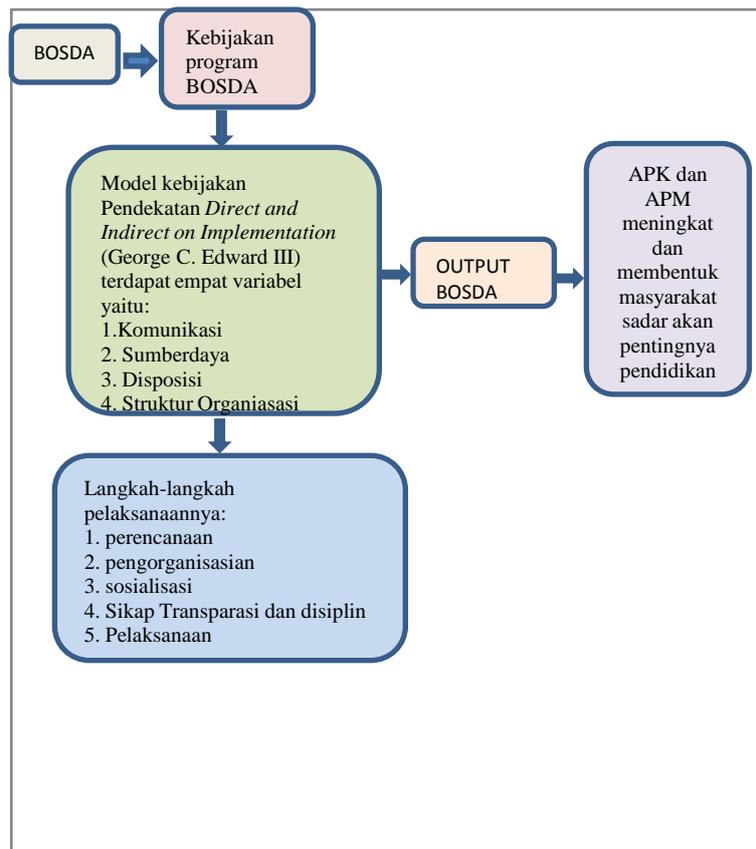
program pun di buat sebaik mungkin untuk keterlaksanaannya program dengan baik.

3. Sosialisasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan mensosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat tentang kebijakan ini supaya dapat berperan serta aktif dapat mengikuti program.

4. Sikap transparansi dan kedisiplinan dalam pelaksanaan program harus benar-benar dilaksanakan supaya dapat menciptakan kebijakan pendidikan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dengan baik.

5. Pelaksanaan di lakukan sesuai dengan juklak dan juknis yang telah ditetapkan supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana dan tujuan program.

Penjelasan di atas dapat di lihat melalui gambar berikut ini:



Kesimpulan dari gambar tersebut adalah bahwa kebijakan pendidikan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang terdahulu membuat konsep dengan model Model kebijakan Pendekatan *Direct and Indirect*

on Implementation (George C. Edward III) yang didalamnya mempunyai empat variabel penting untuk kemajuan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Way Kanan, dan didalam langkah-langkahnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, sosialisasi, sifat transparansi dan disiplin, dan pelaksanaan. Dalam kebijakan pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan APK dan APM usia sekolah di kabupaten Way Kanan tanpa mengenyampingkan mutu pendidikan, dan dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dapat mewujudkan APK dan APM meningkat dan membentuk masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan untuk menjadikan sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat menjadi Kabupaten yang maju dan mandiri.

5. Sistem Pendukung

Mengacu pada kesimpulan diatas, penulis merasa perlu adanya dukungan dalam pelaksanaan model pengembangan diatas. Adapun yang dapat mendukung pelaksanaan model tersebut adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Way Kanan
Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat memberikan dukungan dan sarana dalam program layanan masyarakat tersebut.

2. Dinas P2KA

Dinas P2KA adalah sebagai tempat penyokong anggaran dalam pelaksanaan program layanan masyarakat.

3. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan sebagai wadah untuk konsultasi dalam proses kegiatan pembelajaran dalam program layanan masyarakat.

4. Setiap satuan pendidikan

Satuan pendidikan atau sekolah harus dapat mengupayakan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah dapat berjalan dengan baik sebagai stakeholder dapat bekerja dengan prosedur dan pelaksanaan sesuai aturan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan adalah sebagai berikut:

Pengorganisasian dalam program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sudah mempunyai sistem yang baik dan diharapkan dapat bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, kemudian pelaksanaan kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sudah mengacu pada mekanisme dan prosedur, seperti memahami dasar pelaksanaan kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan disesuaikan dengan pedoman praktek kerja (juklak dan juknis), Proses pelaksanaan mengikuti elemen-elemen seperti: membentuk dan mengarahkan unit organisasi pelaksanaan program, menjabarkan tujuan, menyusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan, dan pengalokasian dana bantuan yang akan dikeluarkan per tri wulan. Proses monitoring masih belum terjadwal dengan jelas waktu dan kapan akan dilaksanakan namun ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan monitoring dilaksanakan, yang menjadi target monitoring adalah pertanggungjawaban pemakaian dan kesesuaian administrasi dengan pelaksanaan, dan pelaporan. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional sekolah adalah waktu pencairan dana masih ada keterlambatan, kurangnya sumber daya manusia dalam teknis, kurang disiplinnya pihak sekolah dalam penyeteroran data setiap waktunya dan masih belum ada transparansi yang jelas terkait penyusunan SPJ nya. Adapun respon dalam masyarakat terdapat dua hal yaitu positif dan negatif.

SARAN DAN REKOMENDASI

*** Bagi Pemerintah/Aktor Kebijakan**

1. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mensosialisasikan tentang pendidikan yang lebih efektif masyarakat umum untuk lebih memahami dan menimbulkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, tidak karena

segi biaya yang murah. Apabila kesadaran masyarakat sudah tinggi tentang pendidikan maka dengan adanya biaya murah atau mahal para masyarakat akan tetap mau menyekolahkan anaknya.

2. Untuk efektifitas proses kebijakan maka perlu adanya pengimplementasian yang tepat dan terprosedur supaya dana tersebut tepat sasaran.

3. Dalam kebijakan pendidikan pemerintah adalah sebagai aktor, maka tidak ada salahnya pemerintah daerah membuat sebuah kebijakan lanjutan terkait BOSDA supaya masyarakat tidak hanya dimanjakan dan bersifat menerima saja kebijakan pemerintah daerah, tetapi pemerintah dapat berupaya memberdayakan masyarakat supaya masyarakat dapat mandiri dalam pembiayaan sekolah anak-anaknya.

4. Dalam pendidikan dana atau biaya adalah hal sangat krusial, terkadang dapat terjadi ketidakseimbang dan ketidakstabilan, apalagi biaya pendidikan tidak murah. Kebijakan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang jumlah dananya terbatas itu belum bisa memenuhi kebutuhan pendidikan, maka masih membutuhkan peran serta masyarakat melalui komite sekolah. Dan setiap sekolah tersebut mempunyai kebutuhan berbeda-beda maka sekolah dan komite sekolah dapat secara mandiri memutuskan atas dasar musyawarah karena merekalah yang mengetahui kebutuhan sekolahnya masing-masing.

5. Pemerintah Daerah seharusnya lebih menfokuskan perhatiannya terhadap masyarakat yang benar-benar kurang mampu,kerapkan kunjungan kerja didaerah-daerah terpencil sehingga Pemerintah Daerah tahu ternyata masih ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan pendidikan dengan baik, kemudian keadaan ekonominya mereka yang sangat memprihatinkan merekalah yang semestinya mendapatkan layanan pendidikan yang lebih membutuhkan.

6. Pemerintah Daerah hendaknya lebih memperhatikan sarana dan prasarana dan kebutuhan peralatan sesuai dengan standar peraturan Pemerintah Pusat untuk mendukung jalannya proses belajar mengajar.

7. Untuk Tim penggerak pendidikan, seperti tim penilai pendidikan, pengontrolan/pengawasan pendidikan, apakah program telah berjalan dengan baik atau tidak, apakah ada penyelewengan yang kurang pantas dalam system pendidikan, dengan hal itu maka Pemerintah dapat memecahkan masalah dengan baik serta memonitoring bukan hanya melaporkan dan kesesuaian penggunaan dana namun diharapkan dapat menjadi solusi dan tempat musyawarah untuk dapat menjadikan Program Bantuan Operasioanal Sekolah Daerah (BOSDA) ini dapat berjalan dan tepat sasaran.

8. Dengan adanya Program Bantuan Opesaional Sekolah Daerah (BOSDA) di harapkan tidak hanya menciptakan peningkatan APK dan APM saja tetapi harus dapat menimbulkan efek yang baik seperi kualitas pendidikan tetap diprioritaskan dan pelayanan pendidikan yang berkualitas tentunya itu harapan program pemerintah yang ingin dicapai.

9. Pemerintah Kabupaten Way Kanan adalah mayoritas petani maka Pemerintah Daerah dapat meningkatkan harga- harga hasil bumi karena hal tersebut berdampak pada kesejahteraan rakyat Way Kanan. karena yang menjadi keluhan masyarakat masalah beban biaya sekolah dan biaya hidup akan dapat diatasi penulis telah mengamati dan melihat masyarakat Way Kanan belum bisa mandiri dalam perekonomian jadi hal itu masih bisa menjadi kendala dalam dunia pendidikan juga. Jadi penulis mengaharapkan kepada pemerintah kabupaten Way Kanan agar dapat mencari solusi atau terobosan. Dan mendidikan masyarakat supaya dapat merubah *mind set* dan budaya berfikir masyarakat supaya menjadi masyarakat yang produktif dan berdampak pada pendidikan dan berakhlak mulia.

***Untuk Pemangku Kebijakan (Stakeholder)**

1. Dana Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) belum bisa disebut ideal untuk mencukupi kebutuhan pendidikan, namun dalam hal ini sekolah dapat bekerja sama dengan komite sekolah agar dapat bekerja sama dengan baik dan berkreatifitas untuk dapat bersama-sama dapat memajukan sekolahnya tidak harus hanya mengandalkan dan bergantung dana dari pemerintah saja, sekolah dan komite dapat bermusyawarah untuk membicarakan kebutuhan anggaran sekolah melalui rapat komite agar kendala yang dihadapi dapat dihadapi bersama. Sekolah dan komite harus dapat bersinergi untuk dapat memajukan sekolahnya dan berusaha mandiri tanpa ketergantungan dari pemerintah karena hanya sekolah yang kelemahan dan kelebihan sekolahnya.

2. Pihak sekolah harus cerdas dalam mengelola sumber dana yang ada, memilih dan memilah kebutuhan yang jadi prioritas. Hendaknya dilakukan subsidi silang sehingga yang kurang dapat terpenuhi.

3. Bagi pendidik seharusnya dapat terus termotivasi untuk mendidik peserta didik walaupun terkadang honoran terkadang tersendat.

4. Bagi siswa seharusnya lebih semangat dan termotivasi untuk dapat belajar dengan baik karena tidak memikirkan masalah beban biaya yang tinggi, dan jangan malah males-malesan dan semaunya karena pendidikan adalah tonggak kemajuan suatu wilayah jadi haruslah terus semangat dalam belajar.

5. Bagi masyarakat dan orang tua hendaknya lebih memahami akan pentingnya pendidikan, bukan hanya biaya yang murah. Jangan selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah saja bersikaplah mandiri demi kemajuan diri sendiri dan berdampak pada suatu wilayah itu sendiri. Ciptakan kesadaran yang tinggi akan pendidikan itu hal yang terpenting

untuk kemajuan anak-anaknya yang berdampak pada kemajuan suatu wilayah, jadi bagi masyarakat dan orang tua jangan merasa terbebani untuk menyekolahkan anak-anaknya karena pasti ada timbal balik yang baik untuk masa depan anda semua dan anak-anak anda semua, mari kita semua sadar akan pendidikan supaya tercipta suatu wilayah yang bersumber daya manusia yang berkualitas, masyarakat yang mandiri dan mempunyai pemerintahan daerah yang peduli, bersih, berdedikasi, dan selalu memprioritaskan rakyatnya jika hal itu dapat terwujud maka pastilah jika Kabupaten Way Kanan dapat menjadi Kabupaten yang berkualitas, dan pastinya akan berdampak pada kemajuan suatu Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bagus.
- Alifudin, M. 2011. *Kebijakan Pendidikan Nonformal: Aplikasi, dan Implikasi*. Jakarta: Magna Script Publishing.
- Burhanuddin. 2003. *Manajemen Pendidikan. Analisis Substantif dan Aplikatif Dalam Institusi Pendidikan*. Universitas Malang.
- Dunn, William N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gajahmada University Press.
- Miles, BM dan Huberman, MA. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta.: Universitas Indonesia.
- Moleong, L.J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penelitian Remaja Rosdakarya

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
2008
tentang pendanaan pendidikan.
- Paul Sabatier, 1983 *Implementation and
Public policy*. (Tesis). Lampung.
Universitas Lampung
- Pasal 81 Ayat (1)
tentang alokasi anggaran belanja fun-
gsi pendidikan dalam APBD
- Pongtuluran, Aris. 2005.
*Kebijakan Organisasi dan Pengambil Keputu-
san Manajerial*. Jakarta. LPMP
- Rahman, B
2010. *Manajemen Mutu Akademi U-
ntuk Meningkatkan Produktivitas Ke-
lembagaan*. (Disertasi).
Bandung: Universitas Pendidikan
Indonesia.
- Sowiyah, 2005. *Manajemen Mutu
Akademi Untuk Meningkatkan
Produktivitas
Kelembagaan* (Disertasi) Malang
- Sihombing, Umberto
dan Indradjo. 2003. *Pembiayaan Pe-
ndidikan*. ISBN
- Syafaruddin, 2008.
*Efektivitas Kebijakan Pendidikan:
Konsep,
Strategi dan Aplikasi Kebijakan Me-
nuju Organisasi Sekolah Efektif*.
Jakarta: PT. Rinela Cipta
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008.
Kebijakan Pendidikan. Jakarta:
Pustaka Pelajar
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang otonomi daerah.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yoyon, B.I. 2011.
*Kebijakan Pembaharuan Pendidik-
an: Konsep, teori dan model*.
Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada